

PEMDA KOLTIM RAPAT KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN 2019 BERSAMA BPK



<https://blud.go.id>

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pekab Koltim) kian perkuat sistem pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terbaru, pihak BPKPD menggelar konsolidasi laporan keuangan daerah lingkup Pekab Koltim, menggelar Rapat Konsolidasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah tahun anggaran 2019 di Kota Kendari pada tanggal 5-8 Februari 2020. Harapannya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dipertahankan untuk realisasi APBD 2019.

Rapat tersebut dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Koltim Eko Santoso, kepala BPKPD, kepala OPD, para Bendahara Pengeluaran dan Barang Kecamatan dan Kelurahan se-Koltim, serta pemateri dari BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara tersebut, sempat menyinggung penganggaran dan hibah dari Kabupaten Kolaka agar cepat diselesaikan dan mencari data real-nya. Eko Santoso mengatakan, Pekab melalui dinas teknis terus berupaya meningkatkan mutu laporan keuangan dan aset daerah terutama hibah dari Pekab Kolaka. Ha tersebut sesuai arahan BPK, rapat konsolidasi ini salah satu upaya kita dalam membenahi laporan keuangan daerah. Kita harapkan Pekab Koltim tetap WTP.

Kepala BPKPD Koltim, Martha S. Hutapea, mengakui konsolidasi keuangan untuk memperkuat serta sinkronisasi laporan masing-masing OPD. Bendahara pengeluaran atau penyimpanan barang dan bendahara penerimaan fokus sinkronkan dengan laporan PPKD. Supaya laporan keuangan Pemda Koltim 2019 dapat lebih akuntabel. Ini sebagai upaya mempertahankan WTP yang telah diberikan BPK Perwakilan Sultra. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Hermanto, mengatakan, Pekab Koltim dapat dapat bekerja dengan baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jika masih terdapat kekurangan, dapat segera dilengkapi. Apabila sudah baik semua pelaporan keuangan dan aset, maka WTP dapat kembali diraih.

Sumber Berita :

1. <https://sultrakini.com>. Pemda Koltim Rapat Konsolidasi Laporan Keuangan 2019 Bersama BPK. Kamis, 6 Februari 2020.
2. Kendari Pos. Pertahankan WTP, BPKPD Konsolidasi Keuangan OPD. Jumat, 7 Februari 2020.

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

Pasal 6 Ayat (1)

Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;*
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;*
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. memimpin TAPD.*

Pasal 189 Ayat (1)

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Penjelasan Umum (c)

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik, Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.